

REVIEW RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renja SKPD diperlukan sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 tahun mendatang sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Landasan hukum terbaru adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 8 Tahun 2008.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka perlu untuk melakukan perbaikan atas Renstra DKP yang sudah ada.

Semoga Renstra ini dapat menjadi akselerator dan panduan dalam pembangunan ketahanan pangan lima tahun mendatang.

Bengkalis, April 2018

Pt.KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS,

SYAFRIZAN, S.Si, MT.M.Sc
PEMBINA TK.I
NIP. 19741024 200003 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN1	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.1 Sumberdaya SKPD	13
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	19
3.3 Telaahan Renstra Kabupaten.....	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
4.2 Strategi dan Kebijakan	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VII PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 April 2012 tentang pangan menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggungjawab atas terwujudnya Ketahanan pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistim Ketahanan Pangan yaitu: (1) sub sistim ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) subsistim distribusi pangan, diartikan dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (3) subsistim konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu SOPD yang dibentuk sebagai perwujudan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan telah dilantiknya kepala daerah baru dan untuk merencanakan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 5 tahun kedepan, maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021, sebagai amanat UU Nomor. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi antar bidang-bidang yang terkait, perumusan rancangan Renstra, perbaikan dan koreksi dan penetapan, sehingga di harapkan akan di peroleh Dokumen Renstra yang terukur, dan mengakomodir semua bidang yang ada.

Dengan disusunnya Renstra periode 2016-2021 maka DKP Kabupaten Bengkalis memiliki panduan dan arahan dalam mewujudkan cita-cita besar daerah yaitu menuju Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal secara bermartabat serta didukung oleh peningkatan SDM pelaku utama di bidang pertanian melalui kegiatan penyuluhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7. Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
12. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tatat Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan DKP Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pelaksanaan program

dan kegiatan DKP Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya

1.3.2 Tujuan

1. Penyamaan persepsi antar SOPD teknis terkait ketahanan pangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DKP Kabupaten Bengkalis;
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan dan Penyuluhan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penulisan |
| Bab II | GAMBARAN PELAYANAN SOPD |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD |
| | 2.2 Sumberdaya SOPD |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKOD |
| Bab III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |
| | 3.1. Identifikasi Pelayanan SKPD |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3. Telaahan Renstra Kabupaten |
| | 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis |

Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat dengan DKP Kabupaten Bengkalis dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008, dan disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis dan dirubah melalui Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda diatas, Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan .

Untuk menjalan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan insfratruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

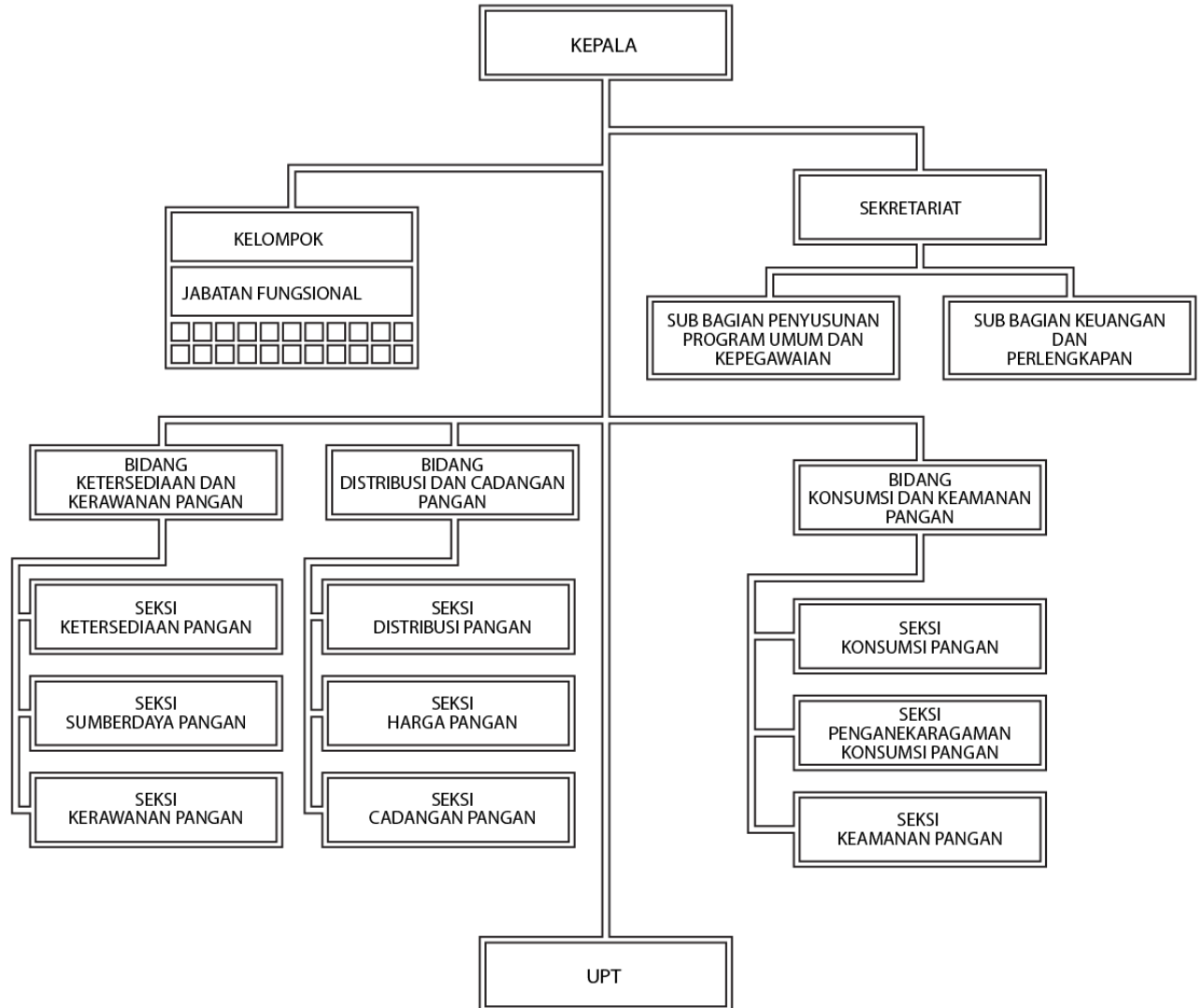
pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka kebijakan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan melalui sebuah lembaga perangkat daerah yaitu “Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan” dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, terdiri dari
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan;
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional berasal dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun struktur organisasi DKP Kabupaten Bengkalis adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala mempunyai tugas:

1. Membantu bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu dibidang ketahanan pangan.
2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan, kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan kerawanan pangan, distribusipangan, cadanganpangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan kerawananpangan, distribusipangan, cadanganpangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidangan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan Pangan.
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
 - e. Pemantau, pengawasan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan , kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas ketahanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas ketahanan pangan.

2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penetaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian keuangan dan perlengkapan

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

1. Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
2. Bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. Penyiapan pealaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - e. Pelaksanan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - f. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan, terdiri dari:
- a. Seksi ketersediaan pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya pangan;dan
 - c. Seksi kerawanan pangan

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- 1. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ,pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi dan cadangan pangan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas kelompok bidang distribusi dan cadangan pangan menyelenggrakan fungsi sebagai berikut
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan,harga pangan dan cadangan pangan
 - b. Penyiapan penysunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi,pangan,dan cadangan pangan
 - c. Penyiapan pelaksana kebijakan dibidang distribusi pangan,harga pangan
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan,harga pangan dan cadangan pangan

- e. Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan,harga pangan,dan cadangan pangan
 - f. Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan,harga pangan,dan cadangan pangan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Susunan organisasi Bidang Distribusi dan cadangan pangan terdiri dari;
- a. Seksi Distribusi pangan
 - b. Seksi harga pangan
 - c. Seksi cadangan pangan

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,pemberian bimbingan teknis dan keamanan
2. Bidang konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordiansi dibidang konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan
 - e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan,keanekaragaman konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan
 - f. Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi pangan,penganekaragaman konsumsi pangan,

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
3. Susunan organisasi bidang konsumsi dan keamanan pangan terdiri dari:
- a. Seksi konsumsi pangan
 - b. Seksi penganekekarngaman konsumsi pangan
 - c. Seksi keamanan pangan

2.2. Sumberdaya SKPD

A. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah satuan Organisasi Kerja, DKP Kabupaten Bengkalis harus didukung oleh sumberdaya manusia yang menempati beberapa posisi jabatan struktural dan jabatan Fungsional serta tenaga sukarela, yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan profesi dan tupoksinya.

Sumberdaya manusia pada DKP Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 1 sampai 3 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Sukarela pada Badan Ketahanan Pangan

No	Unit (Jabatan)	PNS	Non PNS	Tenaga Kerja Sukarela	Jumlah
1	Kepala Badan	1	-	-	1
2	Sekretariat	8	-	-	8
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	8	-	-	8
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	11	-	-	11
5	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	-	-	11
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
7	Tenaga Kebersihan	-	-	12	12
8	Tenaga Keamanan	-	-	7	7
9	Tenaga Sopir kantor	-	-	2	2
TOTAL		39	-	21	60

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan.

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	11
2	Golongan III	21
3	Golongan IV	7
	TOTAL	39

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Golongan	Jumlah
1	Strata II (S2)	4
2	Strata I/Diploma IV	23
3	SMA sederajat	12
	TOTAL	39

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor permanen yang terdiri dari 1 bangunan induk dan 1 bangunan tambahan, dengan jumlah ruang kerja sebanyak 10 ruangan, yang terdiri dari 1 ruang kerja Kepala Badan, 1 ruang kerja Sekretaris, 3 ruang kerja Kepala Bidang, dan sisanya ruang kerja Eselon IV dan Staf
2. Aula, Mushola, Gudang, Dapur dan WC.

3. Peralatan kerja : komputer PC 17 unit, laptop 27 unit, Printer 33 unit, Scanner 1 unit, Proyektor/LCD 5 unit, fotocopy 2 unit
4. Peralatan Kantor : Meja kerja 94 buah, kursi kerja 75 buah, Lemari 22 buah.
5. Sarana transportasi pejabat dan penyuluh lapangan : mobil 8 unit dan motor 58 unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sasaran target renstra periode sebelumnya

Target SPM untuk urusan wajib dan urusan pilihan

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	0.00	0.00	129.34	116.76	115.52
		2 Penguatan Cadangan Pangan	0.00	0.00	510.54	20.00	20.00
B.	Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
C.	Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	0.00	0.00	69.60	76.60	80.90
		6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	0.00	0.00	90.00	100.00	100.00
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang (*Opportunity*)

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk olahan pangan yang aman, sehat, bergizi, dan berkualitas
- b. Pangsa pasar yang semakin terbuka, baik dalam dan luar negeri
- c. Teknologi pertanian yang terus berkembang
- d. Semakin berkembangnya teknologi informasi

Tantangan (*Threat*)

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
- b. Perubahan iklim yang tidak menentu
- c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- d. Berkurangnya jumlah penyuluh.
- e. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- f. Masih terbatasnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

a. Kondisi Ketahanan Pangan daerah

Laju peningkatan kebutuhan pangan, untuk beberapa komoditas lebih cepat dari laju peningkatan produksi. Disamping produktivitas tanaman di tingkat petani pada berbagai komoditas pangan relatif stagnan, juga disebabkan terbatasnya kapasitas produksi. Stagnasi produktivitas antara lain disebabkan oleh lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi, serta rendahnya insentif financial untuk menerapkan teknologi secara optimal.

Secara umum kabupaten Bengkalis masih termasuk kedalam daerah yang belum memiliki kemandirian pangan, karena masih banyak tergantung dari produk luar Bengkalis. Berdasarkan kajian dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, pasokan pangan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat sebagian besar adalah pangan yang didatangkan dari luar daerah. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya jika dipersentasikan mencapai hampir 70 persen hal itu menjadi PR bagi kita pemerintah dan perlu bersama dicari solusi bagaimana Bengkalis dapat mengembangkan hasil pertaniannya. Selain itu kondisi ini diperparah dengan terlalu besarnya ketergantungan penduduk kepada Bengkalis kepada produksi beras, dimana Standar konsumsi pangan di Kabupaten Bengkalis melebihi dari standar nasional.

Walaupun bukan daerah penghasil pangan, akan tetapi tingkat distribusi bahan pangan cukup merata dan terjangkau, yang menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat masih berada pada level yang aman, hal itu terlihat dari angka rata-rata tingkat konsumsi energi dan protein penduduk Kabupaten Bengkalis yang lebih tinggi yaitu 118,3 % dari AKE (Angka Kecukupan Energi), Berdasarkan survei konsumsi pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis pada 8 kecamatan (masing-masing kecamatan 5 desa) di Kabupaten Bengkalis

tahun 2015, diperoleh data bahwa tingkat konsumsi energi sebesar 2.602 kkal/kap/hari dan tingkat konsumsi protein 63,99 gr/kap/hari

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mencermati perkembangan global dan regional yang terkait dengan analisis Geo Ekonomi, Geo politik, dan Geo Strategi, maka Kabupaten Bengkalis menetapkan visi pembangunan daerah tahun 2025 adalah: ***Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia Tenggara, Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Makmur Pada Tahun 2020***".

Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan visi di atas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur perkotaan dan perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan maupun lautan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan.
4. Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana yang memadai.
5. Mengembangkan secara berkelanjutan nilai-nilai agama untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram di tengah-tengah masyarakat dengan dilandasi pengalaman ajaran agama oleh masyarakatnya.
6. Menggali, memelihara, mengaktualisasikan dan mengapresiasi nilai-nilai budaya Melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

7. Pengembangan potensi industri dan perdagangan melalui perluasan jangkauan dan aksesibilitas ke kantong-kantong produksi dan pemasaran.

Visi pembangunan kabupaten bengkalis sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan lima (5) tahun kedua adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”.

Adapun Misi pembangunan yang sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebagai upaya untuk lebih memberikan pedoman bagi fokus-fokus prioritas dalam melaksanakan misi guna mencapai visi telah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Gagasan Pembangunan berdasarkan Sektor, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3. Kesejahteraan Ekonomi Rakyat
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia
5. Lapangan Kerja Untuk Rakyat
6. Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
7. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
8. Pembinaan Agama, Budaya dan Pariwisata
9. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

10. Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

11. Gagasan Rakyat Aset Pembangunan

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis, agar pembangunan lebih terfokus dan terarah, maka Kepala Daerah terpilih menetapkan pembangunan berdasarkan wilayah. Gagasan pembangunan (Gerbang) daerah dengan membagikan pusat kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan kekuatan strategis daerah yang memiliki potensi yang berbeda di tiap daerahnya. Gerbang Pembangunan Negeri ini dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Gerbang Pembangunan Negeri ini dibagi dalam empat wilayah berikut:

1. GERBANG UTAMA

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Fokus gerbang ini menjadikan Pulau Bengkalis sebagai pusat ibukota kabupaten, pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya Melayu Serumpun.

Fokus Pembangunan daerah ini adalah “Menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pendidikan Terpadu dan Pengembangan Budaya Melayu Serumpun”

2. GERBANG LAKSAMANA

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil. Fokus gerbang ini menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat moderen yang pro rakyat.

Fokus Pembangunan daerah ini adalah “Menjadikan Bukit Batu-Siak Kecil sebagai Pusat Pelabuhan Ekspor-Impor yang didukung oleh Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang Modern dan Pro-Rakyat”

3. GERBANG PERMATA

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Fokus gerbang ini menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, perburuhan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

Fokus Pembangunan daerah ini adalah “ Menjadikan Mandau-Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri Daerah di Perlintasan Pulau Sumatera”

4. GERBANG PESISIR

Wilayah ini terdiri Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara. Fokus gerbang ini menjadikan Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara sebagai pusat pengembangan pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Fokus Pembangunan daerah ini adalah “ Menjadikan Rupal-Rupal Utara sebagai pusat pengembangan pariwisata unggulan daerah yang didukung oleh sektor perkebunan, perikanan dan kelautan”

3.3. Telaahan Renstra Kabupaten

Melihat misi kabupaten Bengkalis diatas, maka SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian lebih terfokus pada misi kedua yaitu : “Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat”.

Selain itu Pembangunan Ketahanan Pangan dan penyuluhan tercakup ke dalam Gagasan Pembangunan 6 yaitu Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Menyusun konsep pertanian yang terpadu sesuai dengan potensi kewilayahan mulai dari sektor hulu hingga hilir untuk kemakmuran rakyat.
2. Membuat kebijakan daerah yang melindungi kepentingan ekonomi para petani dan nelayan.
3. Memfasilitasi distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan rakyat.
4. Pemerintah daerah menjamin dan memfasilitasi akses modal bagi para petani dan nelayan dengan membentuk lembaga keuangan untuk petani dan nelayan.

5. Melaksanakan pengembangan program peternakan modern.
6. Optimalisasi Balai Benih Pertanian dan Perkebunan serta pencetakan sawah baru untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Bengkalis.
7. Penerapkan teknologi tepat guna untuk petani dan nelayan.
8. Pemberian bibit dan pupuk bersubsidi untuk para petani.
9. Pemberian bibit unggul ternak bagi para peternak di Kabupaten Bengkalis berdasarkan potensi kewilayahan.
10. Pemberian alat perlengkapan perikanan bagi para nelayan.
11. Melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan secara berkala bagi para petani dan nelayan.
12. Mendirikan pasar tani setiap desa atau beberapa desa pada titik wilayah yang berpotensi dalam menyalur dan mengembangkan hasil pertanian rakyat.
13. Memfasilitasi industri hulu dan hilir berbasis investasi.
14. Mengoptimalkan lahan tidur yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disektor pertanian dan perkebunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan Kabupaten Bengkalis masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2004 yang membagi menjadi 5 titik fokus :

1. Struktur tata ruang, bertujuan untuk memantapkan kembali struktur tata ruang yang mengalami pergeseran akibat pemekaran kabupaten, serta mengarahkan fungsi dan pelayanan pusat-pusat pengembangan sesuai dengan hirarkinya.
2. Pengelolaan kawasan lindung, bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Pengelolaan kawasan budidaya, ditujukan untuk membentuk karakter wilayah yang berbasis kepada pengembangan sektor dan komoditi unggulan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan ruang bagi pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan-kawasan yang diprioritaskan.
4. Pengembangan kawasan prioritas, ditujukan untuk memberikan landasan penetapan prioritas perencanaan dan melaksanakan pembangunan pada kawasan-kawasan yang membutuhkan penanganan mendesak.
5. Pengembangan sistem prasarana wilayah, ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, mendukung pengembangan sektor dan komoditi unggulan, pelayanan prasarana kepada masyarakat dan dunia usaha serta daya saing wilayah.

Rencana RTRW di atas, akan sejalan dengan grand strategy pengembangan empat kawasan, dimana BKPP akan terfokus untuk mendukung pengembangan kawasan Agribisnis dan Agroindustri yang akan dikembangkan. Secara umum wilayah sentra produksi tanaman pangan khususnya padi, dikembangkan pada empat Kawasan Sentra Produksi (KSP), yaitu Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Rupert dan Bantan dengan keterangan sebagai berikut :

- KSP kecamatan Siak Kecil memiliki luas potensi lahan sebesar 4.708 ha dengan luas panen (dimanfaatkan untuk persawahan) sebesar 3.686 ha. Produksi yang ada mencapai 12.130 ton Gabah Kering Giling.
- KSP Bukit Batu memiliki potensi lahan seluas 2,000 ha dengan luas panen 921 ha dan produksi mencapai 3.029 ton GKG.
- KSP Bantan mempunyai potensi lahan seluas 1.800 ha, dengan luas panen 1.104 ha dan produksi mencapai 3.631 GKG
- KSP Rupert mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha dengan luas panen 487 ha dengan produksi sebesar 1.602 ton GKG

Selain 4 KSP tersebut di atas, areal tanaman padi juga terdapat di kecamatan Mandau dengan luas panen seluas 398 ha dengan produksi

sebesar 1.309 ton dan Kecamatan Pinggir dengan luas panen seluas 625 ha dengan produksi sebesar 2.056 ton GKG.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Rencana strategis Dina Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kabupaten dan perencanaan lainnya, oleh karena itu isu-isu strategis SKPD berkaitan erat dengan Renstra kabupaten berkaitan dengan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh suatu daerah, karena pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi daerah mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan dan Gizi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena pangan selain mempunyai arti biologis juga mempunyai arti ekonomis dan politis. Implikasinya bahwa penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan jumlah, keamanan dan mutu gizi yang memadai harus terjamin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah pada setiap saat sesuai dengan pola makan dan keinginan mereka agar hidup sehat dan aktif. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang terus meningkat. Hal ini seiring pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat setiap. Belum seimbang laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi beras menyebabkan pemerintah harus berusaha lebih keras meningkatkan produksi pangan.

Beberapa masalah pengembangan sektor pertanian :

1. Masih rendahnya luas areal tanam dibandingkan dengan potensi yang ada;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian;
3. Pengelolaan budidaya usaha pertanian belum dilakukan secara optimal;
4. rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola pertanian;
5. populasi ternak yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah;
6. masih adanya penyakit hewan menular;
7. sistem budidaya ternak masih konvensional;
8. Kurangnya sumberdaya manusia pengelola peternakan (kualitas dan kuantitas)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Strategi di sini adalah merupakan langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai secara nyata oleh Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bengkalis dalam jangka waktu 1 tahun

Tujuan yang ditetapkan adalah

1. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
3. Meningkatnya capaian Akuntabilitas kinerja dan keuangan

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap
2. Meningkatnya Pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah DKP Kabupaten Bengkalis dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DKP Kabupaten Bengkalis

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	115	125	135	145	155	155
2.	Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Nilai Pola Pangan Harapan	88	90	92	94	95	95
3.	Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang, yaitu pada Tabel berikut:

VISI : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pola Konsumsi yang Sehat			
MISI 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap	Penguatan Sumber-sumber ketersediaan pangan	Melaksanakan Koordinasi terhadap Pihak-pihak terkait.
		Pengendalian Ketersediaan Pangan	Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan terhadap distribusi pangan.
		Penguatan Keamanan Pangan	Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi keamanan konsumsi pangan.

MISI II : Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Mengkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Pola Konsumsi	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan
			Menciptakan Keberagaman Pangan
			Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat
MISI III : Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan tata kelola dan manajemen Pemerintahan yang baik	Meningkat tata kelola manajemen yang akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Badan Ketahanan Pangan di masukkan kedalam Urusan Pilihan disamping itu juga ada program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap SKPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah/kapasitas inovasi daerah. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan tahap awal dan fondasi pembangunan Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025 memfokuskan pada empat pilar yaitu: 1) pembangunan sumberdaya manusia, 2) pembangunan infrastruktur, 3) pembangunan ekonomi kerakyatan dan 4) pembangunan faktor pendukung lainnya.

Sebagai kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021, difokuskan pada lima misi yang dielaborasi dengan dua *Grand Strategy* yaitu *Grand Strategy* Pengembangan Empat Kawasan dan *Grand Strategy* Enam Jaminan.

Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang ingin diwujudkan adalah : 1) Terbangunnya Pusat Pendidikan Nasional di Pulau Bengkalis, 2) Terwujudnya penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, 3) Terwujudnya pengembangan agribisnis di Pulau Bengkalis, 4) Terbangunnya kawasan transit dan industri di Duri dan Pinggir serta terbangunnya *landmark* Kota Minyak Nasional di Duri, 5) Terwujudnya kawasan pariwisata dan sarana penunjangnya yang terintegrasi dengan kawasan agroindustri di Pulau Rupat, 6) Terwujudnya kawasan industri dan sarana penunjangnya di Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul), 7) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, 8) terwujudnya kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Untuk mewujudkan capaian RPJMD tersebut perlu diperhatikan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,

meningkatkan kapasitas aparatur desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll). peningkatan kelestarian lingkungan hidup; termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak; memacu tumbuhnya formasi rumpun usaha dan meningkatkan peran serta investor dari luar daerah, penyederhanaan regulasi usaha, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, dan pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk kawasan perdesaan.

Tabel VII.I Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	110	115	125	135	145	155	155
2.	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	86.31	88	90	92	94	95	95
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

Bengkalis, 28 Agustus 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS, *g*



SYAFRIZAN, S.Si, MT, M.Sc
PEMBINA TK.I
NIP. 19741024 200003 1 004

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Data Capaian Tahun 2016	Target Kinerja rogram dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun	
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp)
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1 Mewujudkan Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	- Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	8 kecamatan	1,180,053,000		1,798,427,425		1,930,000,000		2,248,000,000		2,796,000,000		3,380,000,000		36,067,427,425
			1 Pemangangan daerah rawan pangan	8 kecamatan	172,000,000	14.08	200,000,000	15.48	220,000,000	17.61	250,000,000	78.57	330,000,000	29.58	420,000,000	100.00	1,420,000,000
			2 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	1 laporan	96,000,000	8.75	115,000,000	9.51	125,000,000	20.85	274,000,000	73.91	340,000,000	35.61	460,000,000	100.00	1,314,000,000
			3 Pengembangan cadangan pangan daerah	Beras 20 ton	241,666,000	15.00	265,000,000	16.18	275,000,000	17.85	300,000,000	81.25	380,000,000	28.24	480,000,000	100.00	1,700,000,000
			4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	2 kawasan	219,000,000	14.42	235,000,000	15.34	250,000,000	16.87	275,000,000	77.55	380,000,000	30.06	480,000,000	100.00	1,630,000,000
			5 Koordinasi dewan ketahanan pangan (KDKP)	4 kali rapat	306,987,000	18.97	325,000,000	18.54	355,000,000	19.58	375,000,000	79.17	380,000,000	25.07	480,000,000	100.00	1,915,000,000
			6 Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis	1 kegiatan	144,400,000	12.28	175,000,000	14.39	205,000,000	15.79	225,000,000	82.22	370,000,000	31.58	450,000,000	100.00	1,425,000,000
			7 Pengembangan Lumbung Pangan Desa	1 kegiatan	-	-	-	20.51	400,000,000	23.06	450,000,000	25.64	500,000,000	30.77	600,000,000	100	1,950,000,000
			8 Pengadaan rumah dan mesin pengolahan tepung tapioka	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1 Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	- Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1 laporan	2,244,190,000.00		2,520,000,000		2,805,000,000		8,645,000,000		3,726,000,000		4,280,000,000		1,360,000,000
			1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	1 laporan	145,640,000	12.50	170,000,000	14.71	200,000,000	16.18	220,000,000	83.33	350,000,000	30.88	420,000,000	100.00	2,290,000,000
			2 Pemanfaatan pekerangan untuk pengembangan pangan	1 kegiatan	316,950,000	18.38	375,000,000	17.47	400,000,000	18.58	425,000,000	87.93	510,000,000	25.33	580,000,000	100.00	3,560,000,000
			3 Lomba cipta menu pangan (3B+) dan sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B3+)	3 kegiatan	517,000,000	17.89	635,000,000	18.31	650,000,000	19.01	675,000,000	96.30	780,000,000	22.82	810,000,000	100.00	2,135,000,000
			4 Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	8 kecamatan	283,950,000	16.39	350,000,000	17.56	375,000,000	18.74	400,000,000	94.23	490,000,000	24.38	520,000,000	100.00	1,805,000,000
			5 Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar	8 kecamatan	343,630,000	15.24	275,000,000	16.62	300,000,000	18.01	325,000,000	74.04	365,000,000	28.81	520,000,000	100.00	1,680,000,000
			6 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 laporan	140,000,000	9.82	165,000,000	16.67	280,000,000	17.86	300,000,000	83.33	425,000,000	30.36	510,000,000	100.00	4,575,000,000
			7 Sosialisasi kewaspadaan pangan dan gizi	8 kecamatan	248,510,000	6.01	275,000,000	6.58	300,000,000	66.85	3,150,000,000	84.78	380,000,000	10.05	460,000,000	100.00	4,575,000,000
			8 Lokakarya Sadar Pangan	36 Orang	248,510,000	6.01	275,000,000	6.58	300,000,000	66.85	3,150,000,000	84.78	380,000,000	10.05	460,000,000	100.00	4,575,000,000



PIL. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

SYAFRIAN, S.Si, MT, M.Sc
PEMBINA/TK.1
NIP. 20741024 200003 1 004